

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Mengacu hasil analisa isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam Bab IV Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Analisis Isu-isu Strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian juga dengan faktor internal dan eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi di Kabupaten Pati sebagaimana Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pati

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Kesenjangan sosial politik, sosial ekonomi dan budaya;
2. Belum maksimalnya pendidikan politik di masyarakat;
3. Hasil proses politik (Pilkades) masih sering di komplain oleh kandidat lain;
4. Masih sering terjadi perselisihan antar warga terkait pendirian rumah ibadah;
5. Kurangnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan sehingga mengakibatkan lemahnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
6. Penambangan Ilegal galian C (sirtu) yang merusak sumber daya alam dan lingkungan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pati

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258 menyebutkan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Visi bupati-wakil bupati terpilih Tahun 2017-2022, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah: "MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK"

Visi tersebut memuat dua unsur fokus cita-cita, yaitu: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan (2) meningkatnya pelayanan publik. Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah.

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2021 merupakan penjabaran dari 8 (misi) Bupati Terpilih.

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sesuai dengan 8 misi :

1. Misi Bupati-Wakil Bupati Pati terpilih Tahun 2017-2022 dalam upaya untuk mewujudkan Visinya adalah :
 - a. Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian social dan bermanfaat;
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan;
 - c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
 - d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Baik, Bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
 - e. Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktifitas daerah;
 - f. Meningkatkan daya saing daerah ;
 - g. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah;
 - h. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan jajaran terkait dapat

mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati , dalam mengemban misi Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat yang berkualitas dan berkarakter menjunjung tinggi nilai- nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah sebagai modal dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran.

2. Permasalahan dalam Pengembangan Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama serta Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM dapat mengganggu dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah lima tahun ke depan. Ada faktor yang penghambat bagi Kantor KesbangPol Kab. Pati adalah menjamurnya Perkembangan Ormas/LSM yang berkeinginan untuk mengawasi semua aktivitas pemerintahan. Tetapi disayangkan tanpa adanya control yang jelas serta minimnya Kualitas SDM sebagian Ormas/Lsm, yang pada akhirnya justru berdampak negative dan tak searah dengan cita-cita reformasi dan Memang tidak dipungkiri ada dampak positif dari Reformasi yaitu : Pertama, Mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis, dan demokratis, dan *Kedua*, tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan negara (Parpol, Ormas/LSM dan Independent).

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Visi Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2015-2019 adalah: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Dari visi dan misi Kementrian Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Badan Kesbangpolinmas dalam lima tahun ke depan ada beberapa kesesuaian dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut, yaitu: visi terbentuknya sistem politik demokratis, dan kebudayaan masyarakat yang partisipatif.

Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Renstra Kemendagri tahun 2015-2019 tersebut adalah :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Dari misi Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut yang sesuai dengan bidang pembangunan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat adalah **misi** ke-1 yaitu: Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

Terdapat beberapa Indikasi kebijakan terkait lingkup tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam kerangka RPJMN tahun 2015-2019 yaitu :

- a. Isu-isu terkait penciptaan kondisi aman dan damai.
 - 1) Mendorong kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa.
 - 2) Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan.

- b. Isu-isu pemantapan penyelenggaraan pemerintah
 - 1) Memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah
 - 2) Mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan
 - 3) Memantapkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan.
 - 4) Meningkatkan profesionalisme aparatur Negara di Pusat dan Daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
- c. Isu- isu terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - 1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataannya sebanding dengan tingkat kesejahteraan Negara-negara berpenghasilan menengah
 - 2) Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
 - 3) Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat
 - 4) Meningkatkan kesetaraan gender, tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak
 - 5) Mendorong tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang
 - 6) Memantapkan budaya dan karakter bangsa
- d. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembanguna dan lingkungan hidup
 - 1) Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
 - 2) Mendorong terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari
 - 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam
 - 4) Mendorong pelestarian fungsi lingkungan hidup
 - 5) Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat
 - 6) Memantapkan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.
- e. Isu-isu terkait peningkatan daya saing perekonomian
 - 1) Memperkuat daya saing perekonomian Indonesia
 - 2) Memantapkan kerja sama pemerintah dan dunia usaha
 - 3) Meningkatkan penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
- f. Isu-isu terkait peningkatan infrastruktur

- 1) Mendorong ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi
- 2) Mendorong terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air
- 3) Mendorong terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
- 4) Mendorong pengembangan infrastruktur perdesaan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian
- 5) Mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

yaitu: Memperkokoh Kesatuan dan Persatuan Nasional serta Stabilitas Politik Dalam Negeri yang Dilandasi oleh Semangat dan Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui Pengembangan Sistem Politik yang Demokratis dan Berkedaulatan Rakyat; dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu Legislatif/Pemilu Presiden);
2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan; dan
4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029 telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010. Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah terwujudnya ruang Provinsi Jawa Tengah yang lestari dengan memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang;
- c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Dari kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah tersebut, ada kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi program pembangunan di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat, yaitu kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa; yaitu strategi :

1. Meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;
2. Mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan ini sesuai dengan misi ke-4 dalam renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, yaitu: Mewujudkan Stabilitas Masyarakat yang Kondusif untuk Mendukung Terciptanya Ketahanan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Jawa Tengah.

Selain itu, misi ke-4 tersebut juga sesuai dan relevan guna mengantisipasi beberapa persoalan yang muncul di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan sebagai dampak dari kebijakan dan pengembangan rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

- a. Potensi konflik sosial akibat dampak pengalihan dan penggunaan lahan yang akan digunakan sebagai lahan pengembangan kawasan strategis.
 - b. Potensi konflik perebutan sumber daya alam akibat dampak pengembangan kawasan pertambangan atau perindustrian.
 - c. Potensi konflik perbatasan atau antar wilayah atau daerah sebagai dampak pengembangan wilayah perbatasan.
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut, dalam rangka mengantisipasi dampak dari kerusakan lingkungan dan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran kelembagaan terhadap pelestarian kerusakan lingkungan hidup, dalam renstra Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati 2017-2022 telah memuat misi ke-1, yaitu: Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;

3.5 Isu-Isu Strategis

Tantangan isu nasional lainnya adalah sebagaimana disebutkan sebagai sasaran pokok pembangunan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 258, yaitu: (i) peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; (ii) kesempatan kerja; (iii) lapangan berusaha; (iv) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; (v) daya saing daerah.

Tantangan isu dari RPJMD Provisi Jawa Tengah, yaitu: (i) Kemiskinan; (ii) Pengangguran; (iii) Infrastruktur; (iv) Kedaulatan Pangan; (v) Kedaulatan Energi; (vi) Tata Kelola Pemerintahan; (vii) Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah.

Tantangan isu dari kewenangan daerah Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Mandat RPJPD Kabupaten Pati yaitu: (i) Kualitas SDM yang berkualitas dan berbudaya; (ii) pertumbuhan ekonomi; (iii) lingkungan hidup yang berkelanjutan; (iv) tata pemerintahan yang baik; (v) prasarana dan sarana yang kondusif; (vi) daya tarik dan daya saing daerah.
2. Mandat dari RTRW kabupaten Pati yaitu: (i) melayani PKL; (ii) sebagai salah satu kawasan lindung geologi.
3. Mandat Visi misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Pati, yaitu: (i) isu kesejahteraan masyarakat; (ii) Isu pelayanan publik.
4. Tantangan isu dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis, diidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas, yaitu: (i) Isu kemiskinan; (ii) Isu penurunan produktivitas tanaman pangan; (iii) Isu penambangan tanpa izin; (iv) Isu rawan bencana alam dan iklim; (v) Isu penurunan kualitas dan kuantitas air; (vi) Isu pengelolaan limbah domestik belum optimal; (vii) Isu pengelolaan limbah industri belum optimal; (viii) Isu pengelolaan persampahan belum optimal; (ix) Isu kurang sadarnya masyarakat dalam pengelolaan hutan; (x) Isu menurunnya tutupan lahan hijau.

5. Setelah melakukan analisis SWOT isu, dilakukan proses pembobotan isu, dan konsultasi publik, maka ditarik kesimpulan bahwa payung besar isu strategis Kabupaten Pati meliputi:

- a) Isu sarana prasarana wilayah dan kerja sama antar daerah;
- b) Isu pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana;
- c) Isu Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- d) Isu Penguatan ekonomi dan daya saing daerah;
- e) Isu tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati, telaah visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta telaah visi-misi Renstra Kemendagri tahun 2015-2019 maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Merosotnya pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
2. Merosotnya kesadaran terhadap pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
3. Rendahnya pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik, di masyarakat.
4. Masih sering terjadinya kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.